



**DEWAN PERWAKILAN RAKYAT
REPUBLIK INDONESIA**

LAPORAN SINGKAT

**KOMISI VIII DPR RI (BIDANG AGAMA, SOSIAL, PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN
PERLINDUNGAN ANAK, DAN KEBENCANAAN)**

Tahun Sidang	: 2021-2022
Masa Persidangan	: II
Rapat Ke	: 7
Jenis Rapat	: Rapat Kerja
Dengan	: Menteri Agama RI
Sifat Rapat	: Terbuka
Hari, Tanggal	: Selasa, 30 November 2021.
Waktu	: Pukul 10.00 WIB.
Tempat	: Ruang Rapat Komisi VIII DPR RI Gedung Nusantara II lantai 1 Jl. Jenderal Gatot Subroto – Jakarta 10270.
Acara	: Perkembangan Kebijakan Penyelenggaraan Ibadah Haji dan Umrah.
Ketua Rapat	: H.Yandri Susanto, S.Pt
Sekretaris Rapat	: Sigit Bawono Prasetyo, S.Sos., M.Si.
Hadir	: 1. 46 dari 50 Anggota Komisi VIII DPR RI. 2. 4 Anggota Komisi VIII DPR RI Izin. 3. Menteri Agama RI Beserta Jajaran.

I. PENDAHULUAN:

1. Ketua Rapat membuka Rapat Komisi VIII DPR RI pada pukul 10.15 WIB dan dinyatakan terbuka untuk umum.
2. Rapat dipimpin oleh Ketua Komisi VIII DPR RI, H.Yandri Susanto, S.Pt dengan didampingi Wakil Ketua Hj.Diah Pitaloka, S.Sos., M.Si., Wakil Ketua DR. H. TB. Ace Hasan Syadzily, M.Si dan Wakil Ketua H. Marwan Dasopang, M.Si, sesuai waktu dan tempat acara tersebut di atas.

II. KESIMPULAN/KEPUTUSAN

Pada Rapat Kerja Komisi VIII DPR RI dengan Menteri Agama RI membahas **"Perkembangan Kebijakan Haji dan Umrah serta Isu-isu Aktual"**, disimpulkan beberapa hal sebagai berikut:

1. Komisi VIII DPR RI meminta Menteri Agama RI untuk mempersiapkan kebijakan penyelenggaraan ibadah umrah yang lebih berpihak pada kepentingan calon jemaah, baik aspek pembinaan, pelayanan, maupun perlindungan, di antaranya dengan:
 - a. Mempersiapkan calon jemaah umrah yang benar-benar siap sebagai duta bangsa agar tidak di-*suspend* kembali oleh Pemerintah Arab Saudi dan melakukan sosialisasi kepada asosiasi Penyelenggara Perjalanan Ibadah Umrah (PPIU) mengenai kebijakan dan skenario penyelenggaraan umrah di masa pandemi Covid-19.
 - b. Meningkatkan komunikasi dan diplomasi dengan Kementerian Haji dan Umrah Arab Saudi untuk kepastian teknis operasional penyelenggaraan ibadah umrah, kuota dan skenario keberangkatan jemaah, prosedur *apply* visa umrah, dan pemaketan layanan bagi jemaah umrah.
 - c. Mengoptimalkan koordinasi dengan Kementerian Kesehatan RI dan Satgas Covid-19, khususnya dalam upaya pengintegrasian Sistem Komputerisasi Terpadu Umrah dan Haji Khusus (Siskopatuh) Kemenag dengan aplikasi PeduliLindungi dan sinkronisasi dengan aplikasi *Tawakalna* Arab Saudi.
 - d. Segera melakukan revisi KMA Nomor 719 Tahun 2020 tentang Pedoman Penyelenggaraan Perjalanan Ibadah Umrah pada Masa Pandemi Covid-19 dan KMA Nomor 777 Tahun 2020 tentang Biaya Penyelenggaraan Perjalanan Ibadah Umrah Referensi Masa Pandemi.
 - e. Memastikan kesiapan asrama haji Pondok Gede sebagai tempat pelaksanaan skema *One Gate Policy*.
2. Komisi VIII DPR RI mendukung Menteri Agama RI untuk mengoptimalkan diplomasi dengan Pemerintah Arab Saudi, khususnya agar segera dilakukan *Memorandum of Understanding (MoU)* antara Pemerintah Arab Saudi dengan Pemerintah RI pada persiapan Penyelenggaraan Ibadah Haji Tahun 1443 H/2022 M.
3. Komisi VIII DPR RI dan Menteri Agama RI akan segera membentuk Panitia Kerja Biaya Penyelenggaraan Ibadah Haji (BPIH) Tahun 1443 H/2022 M untuk membahas komponen biaya dan kebijakan operasional Penyelenggaraan Ibadah Haji.
4. Komisi VIII DPR RI akan melakukan Rapat Kerja dengan Menteri Agama RI, Menteri Kesehatan RI dan Menteri Perhubungan RI untuk membahas persiapan penyelenggaraan umrah dan haji di masa pandemi.

5. Komisi VIII DPR RI meminta Menteri Agama RI untuk menindaklanjuti masukan Pimpinan dan Anggota Komisi VIII DPR RI sebagai berikut:
- a. Merumuskan kebijakan penyelenggaraan umrah dan haji di masa pandemi dengan mengedepankan kepatuhan pada protokol kesehatan dalam upaya mewaspadai munculnya gelombang ketiga akibat adanya varian baru Covid-19.
 - b. Mendukung revitalisasi Unit Percetakan al-Qur'an (UPQ) berstandar internasional.
 - c. Memaksimalkan realisasi anggaran tahun 2021 untuk pelaksanaan program Kementerian Agama RI yang telah direncanakan.
 - d. Memprioritaskan alokasi anggaran untuk penyelesaian masalah Tunjangan Profesi Guru (TPG) dan *Inpassing* Guru Agama Non-PNS.
 - e. Memprioritaskan aspirasi hasil Kunjungan Kerja Komisi VIII DPR RI.

III. P E N U T U P

Rapat ditutup pukul 13.20 WIB.

**PIMPINAN KOMISI VIII DPR RI
KETUA,**



H.YANDRI SUSANTO, Spt.